

## **IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)**

*Indra A. Pantow<sup>1</sup>  
Sofia Pangemanan<sup>2</sup>  
Ventje Kasenda<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Desa merupakan entitas penting dalam Negara kesatuan Indonesia, salah satu instrumen penting dalam desa yaitu pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat sehari-hari, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembangunan serta faktor yang menghambat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa tempok sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami namun itu bisa berjalan dengan baik, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dibangun di tahun 2016 namun yang difokuskan adalah perbaikan jalan kebun untuk aktivitas perekonomian masyarakat di perkebunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan kesejahteraan hidup, namun dalam pembangunan masih terdapat kendala yang menghambat dalam pembangunan, tapi semua pembangunan infrastruktur bisa terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Infrastruktur, Aktivitas Perekonomian.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu instrument penting dalam pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur desa, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. laju pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut, bukan hanya dengan bangunan-bangunan fisik saja yang mengiasi wilayah tersebut. Kebijakan infrastruktur dapat di jadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa di pastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastuktur yang relative jelek keadaan ekonominyapun cenderung tidak begitu bagus karena Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat di pengaruhi oleh pembangunan itu sendiri. Pembangunan infrastuktur di desa tempok selatan sangat menunjang aktifitas perekonomian sehari-hari masyarakat dilihat dari pembangunan infrastrukturnya yaitu penerangan lampu jalan, drainase, jalan desa, gorong-gorong, bahu jalan, dan infrastruktur lainnya. namun Dalam pembangunan infrastruktur di desa tempok selatan masih terdapat kendala yang menghalangi pembangunan infrastruktur yaitu faktor yang menghambat pembangunan dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat salah satunya dalam

pembangunan jalan kebun, masih ada masyarakat yang tidak menginginkan wilayahnya perkebunan mereka di jadikan jalan untuk aktifitas pertanian padahal mayoritas masyarakat tempok selatan pekerjaan sebagai petani sehingga sangat memudahkan untuk mereka melakukan aktifitas sehari-hari mereka di perkebunan, karna masalah itulah pembangunan sangatlah terhambat padahal dikatakan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa paal 78 ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana prasarana pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pembangunan infrastruktur desa tempok selatan dana bersumber dari alokasi dana desa(ADD). Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang di berikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa(ADD), sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang

menimbulkan pendapat belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan APBN yang di terima oleh kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK) sebesar 10% dana tersebut dapat di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari Geografis desa, jumlah penduduk serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) implementasi adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan/ penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau atau pelaksana rencana rencana yang telah di susun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan . tak hanya

sekedar aktivitas implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta di laksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Menurut H. Tachjan (2006: 25) implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down yang berarti lebih rendah/ alternatif menginterpretasikan. etimologis implementasi itu dapat di maksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu dan memperoleh hasil. Pendekatan seperti ini memberikan arah yang jelas bagi penelitian pelaksanaan (implementation research) pendekatan ini menekankan sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dan pada aktifitas-aktifitas dari mensin implementasi yang di beri mandat secara legal yang menawarkan indikasi-indikasi jelas mengenai apa yang harus di pahami oleh pelaksana dan mengenai apa tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam proses pembangunan suatu wilayah diawali dengan kebijakan pembangunan Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati

ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Soetomo:2008:27 pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.

Menurut Rogers dalam Risma Handayani (2014:14) pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan

pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Solekhan mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dimulai dengan tahap perencanaan pembangunan desa. Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan (2009:5) yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a) Perencanaan berarti memilih
- b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,
- c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
- d) Perencanaan berorientasi masa depan

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie,2005;101) Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

(Kodoatie, 2005:15) Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan

similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) aktivitas adalah kegiatan atau kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian dalam sebuah organisasi.

Menurut tjokroamudjojo (2010:11) aktifitas adalah usaha-usaha yang dikemukakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan untuk melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, ditempat mana pelaksanaan, kapan waktu di mulai dan berakhir, lebih lanjut aktivitas adalah suatu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ilmu ekonomi mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) serta berbagai hal mengenai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.

Menurut Wikipedia ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas kegiatan atau kesibukan yang dilakukan manusia aktifitas juga tidak hanya sekedar kegiatan tetapi aktivitas dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan. Sedangkan aktivitas perekonomian dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa tentu sesuai dengan kebutuhannya sehari-

hari. Kegiatan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya selain itu kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kegiatan cara untuk mendapatkan maupun mencapai tujuan. aktivitas juga dipahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan itu di turunkan dalam bentuk proyek. Dengan demikian dalam oprasionalnya aktivitas dapat dirasakan perlu adanya penerapan fungsi manajemen yakni pelaksanaan kegiatan operasional dengan dasar pemahaman bahwa rangkainan tindak lanjut merupakan upaya positif (efektif dan efisien) kearah tujuan akhir. Disamping itu adanya pelaksanaan yang terlibat dalam pencapaian tujuan merupakan adanya penggerakan kegiatan dalam suatu tujuan tertentu.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar peneltian, sumber data, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif dan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang implementasi pembangunan infrastruktur di desa tempok selatan. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian

yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data di dapat dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian sedangkan data sekunder melalui Library Research yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya.

Fokus penelitian ini adalah pemusatan pada objek penelitian yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur dan infrastruktur yang dimaksud yaitu jalan kebun untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat tempok selatan. teori Solekhan moch(2014:70) mengatakan bahwa pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antara desa dalam satu kabupaten/ kota yang meliputi :

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang.
- 2) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

## Hasil Penelitian

Setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan, maka hal yang selanjutnya dilakukan ialah menganalisis data , yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara Berdasarkan hasil wawancara yang didapat mengenai implementasi pembangunan infrastruktur desa tempok selatan dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah desa bisa terealisasikan.

Dalam pembangunan pemanfaatan wilayah sangat penting untuk pembangunan apapun itu sama halnya dengan pembangunan infrastruktur desa tempok selatan, dalam pemilihan wilayah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, jika pemerintah memilih wilayah yang jauh dari kehidupan aktivitas masyarakat maka sangat disayangkan itu tidak akan digunakan penuh oleh mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ada beberapa masalah dalam pembangunan desa yaitu lahan, ada masyarakat yang tidak mau lahan perkebunan mereka dijadikan pelebaran jalan oleh pemerintah desa untuk perbaikan pengerasan jalan kebun, sehingga pembangunan terganggu dengan adanya masalah tersebut padahal mayoritas masyarakat adalah petani, sehingga memudahkan mereka untuk aktivitas perekonomian di perkebunan.

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan pembangunan di desa tempok selatan yaitu pemerintah harus mengkoordinasi atau bekerja sama dalam hal pembangunan dengan cara melakukan musrembangdesa agar masyarakat mengetahui program-program apa saja yang akan direalisasikan khususnya pembangunan infrastruktur di desa tempok selatan agar tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana di desa tempok selatan sangatlah membantu aktivitas perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat menjadi bertambah dengan adanya perbaikan jalan kebun aktivitas perekonomian mereka meningkat pesat karna mereka tidak perlu lagi membawa hasil pertanian mereka kepasar karna

sudah pembeli yang langsung turun membeli hasil pertanian mereka.

Namun dalam hasil wawancara dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa masih ada kejanggalan dalam pembanguan infrastruktur desa, pemerintah harus lebih transparan dalam penggunaan dana desa, mengingat keikut sertaan masyarakat dalam pembanguan masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program kedepan dari pemerintah desa akan tetapi pembanguan infrastruktur desa tempok selatan sudah baik namun belum dikatakan sempurna masih ada perekjaan rumah khususnya pembanguan infrastruktur yang harus dibangun. untuk itu masyarakat juga harus bekerja sama dengan pemerintah yaitu menjaga infrastruktur yang sudah dilaksanakan demi untuk kehidupan akan mendatang.

Memang setelah pembanguan sudah terealisasikan aktivitas perekonomian masyarakat sangatlah dimudahkan dengan adanya pembanguan infrastruktur, pembanguan infrastruktur sangatlah menopang, bukan hanya masyarakat bahkan tingkat perekonomian desa sangatlah berpegaruh dengan adanya pembanguan infrastruktur, infrastruktur yang bagus bisa dikatakan tingkat perekonomian desa itu maju.

Memang program pemeritah desa tempok selatan dalam pembanguan infrastruktur yang sudah terlaksana di tahun 2016 bukan Cuma satu namun ada beberapa tapi yang menjadi fokus pembanguan mereka yaitu perbaikan pengerasan jalan kebun untuk aktivitas perekonomian masyarakat khususnya masyarkat yang berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan informan, memang

pemberdayaan yang dilakukan pemeritah dengan cara pembanguan infrastruktur sudah sangat bagus dan sesuai dengan kebutuhan mereka, namun pemeritah juga harus menapung aspirasi masyarakat kebutuhan masyarkat lainya bukan hanya pembanguan infrastruktur saja yang dibutuhkan oleh mereka melainkan kebutuhan pokok yang sangat mereka butuhkan mengingat tidak semua masyarakat yang harus bekerja di kebun ada juga yang hanya tingal menikmati saja hasil dari pertanian itu misalnya para lanjut usia(lansia) merekat tidak bisa lagi beraktivitas seperti orang yang masih normal yang bisa pergi kekebun untuk berativitas, pemeritah tempok selatan harus memperhatikan bukan hanya pembanguan infrastruktur saja melainkan pembedayaan kesejahtaraan masyarkat yang harus menjadi prioritas utama dalam kelangsungan hidup sesuai dengan pancalisa dan undang-undang dasar.

Pembanguan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang di anggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan teretentu yang di kehendaki. Bila pemahaman tersebut diaplikasikan di desa maka pembanguan desa merupakan perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik, kearah yang lebih baik atau lebih diinginkan.

Dalam pembanguan lahan menjadi faktor khususnya pembanguan infrastruktur jalan, pada kenyatannya masih ada masyarakat yang tidak mau lahan pekebunan mereka dijadikan jalan untuk aktivitas perekonomian desa tempok selatan padahal mayoritas mata pencaharian masyarkat tempok selatan sebagai petani.

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan keinginan kelompok masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (pemerintah Desa) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam implementasi pembangunan karena sangat mempengaruhi kelancaran suatu program serta kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang telah disediakan pemerintah, juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya pembangunan di Desa tempok selatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dengan merujuk pada faktor-faktor diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pembangunan infrastruktur di desa tempok selatan. Oleh karenanya untuk memperlancar berjalannya suatu program dalam pemerintahan maka hal penting yang harus diterapkan yang menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. dan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program pembangunan yang telah dan akan dikerjakan agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

Menyadari adanya beberapa hambatan dalam implementasi

pembangunan infrastruktur di Desa tempok selatan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan desa, maka pemerintah desa seharusnya menerapkan beberapa alternatif seperti:

- a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan  
Banyak yang berfikir bahwa transparansi sudah dilakukan dengan menyebarluaskan suatu program kepada masyarakat atau menempelkan pengumuman pada lokasi tertentu yang memungkinkan untuk dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Padahal transparansi perlu diadakan sosialisasi tentang maksud dan tujuan serta manfaat program tersebut, di perkirakan jumlah dana yang akan dipakai dan lain sebagainya yang bersifat privasi. Karena jika semua dijelaskan maka akan timbul rasa untuk ikut berperan serta dalam program tersebut.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, Komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melemahkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik maka otomatis program-program pemerintah akan tersampaikan kepada masyarakat (memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah) dan masyarakat pasti memiliki rasa ingin ikut serta dalam program tersebut, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik karena masyarakat dapat turut andil dalam program tersebut.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus memiliki beberapa alternatif

agar dapat mendukung berjalannya program-program pemerintah khususnya dalam program pembangunan infrastruktur yaitu antara lain:

- a. Masyarakat Desa tempok selatan harus memiliki kesadaran bahwa infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah adalah milik masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab bersama, karena infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Jika infrastruktur tersebut tidak di jaga dengan baik maka kondisinya akan mudah rusak.
- b. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap program-program pemerintah termasuk dalam program implementasi pembangunan infrastruktur agar program tersebut terlaksana sesuai target dan hasilnya pun dapat optimal.
- c. Menumbuhkan rasa solidaritas, seperti misalnya pemerintah akan mengadakan kerja bakti di desa jadi semua masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

## Kesimpulan

1. Secara umum pembangunan desa tempok sudah sesuai. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan dilihat dari pelaksanaannya di tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala yang di alami namun itu bisa berjalan dengan baik.
2. Memfokuskan pada pembangunan jalan sebagai sarana transportasi darat yang digunakan masyarakat dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, belum

maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

3. Dalam tahun anggaran 2016 pembangunan semua terlaksana namun yang difokuskan adalah pembangunan infrastruktur. Dalam tahap ini pelaksanaan partisipasi masyarakat masih kurang, yang ikut berpartisipasi hanya sebagian masyarakat yang digaji untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
4. Adapun faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur desa tempok selatan yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum lagi lahan yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat masih kurang hanya sebagian yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

## Saran

1. Lebih memaksimalkan pembangunan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur mengingat dengan adanya dana desa pembangunan di desa-desa akan lebih maju dan meningkat setiap tahunnya.
2. Pengoptimalan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan unsur masyarakat setempat.
3. Lebih meningkatkan lagi pendekatan antara pemerintah dan masyarakat setempat agar setiap program apa saja yang akan dilakukan di desa tempok selatan masyarakat akan mengetahui dan akan berpartisipasi penuh dalam kegiatan tersebut.
4. Untuk masalah yang dihadapi, pemerintah harus mensosialisasikan pembangunan sebelum pembangunan itu dijalankan dengan cara musrembangdes tentunya dengan keikutsertaan sepenuhnya

masyarakat agar tidak ada gangguan apapun dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deddy mulyana, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kodoatie, 2005. Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Lingkup Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kodoatie R.J. 2005. Pengantar manajemen infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narimawati, 2008, dalam bukunya. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Bumi Aksara
- H.Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Universitas Padjajaran Bandung: APII Bandung.
- Robinson Taringan, 2009. Perencanaan Pembangunan Wilayah: edisi Revisi. Jakarta: PT bumi aksara.
- Risma Handayani, 2014. Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Makassar: Alauddin University Press.
- Sugiono, 2015, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Solichin abdul wahab, 2008. Analisis Kebijaksanaan. universitas Muhammadiyah malang: bumi aksara.
- Solekhan Moch, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Wisma Kalimetro.
- Siagian Sondang P, 2008. Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo, 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto dkk, rivensi 2010. Pembangunan Ekonomi Daerah. Jakarta: esensi erlangga group.
- Sutrisno eddy, 2007. Menejemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: kencana prenatal media group.